WAHHABIYAH DI BALIK BERITA : FAKTA, MITOS, DAN REALITAS

Leza Anggraini[1], Nurula Ikrima Fitri[2], Edy Kusnadi[3]

[1,2,3,4,5]*Universitas Islam Negeri Jambi*
E-mail : [1]leza2207@gmail.com, [2]nurulaikrimafitri@gmail.com, [3]edykusnadi@uinjambi.ac.id

ABSTRAK

Istilah *Wahhabiyah* sering digunakan dalam pemberitaan untuk menjelaskan konservatisme Islam, politik Arab Saudi, hingga ekstremisme. Namun, pemakaian istilah ini kerap tidak presisi dan bercampur dengan agenda polemik, sehingga memunculkan mitos yang menyederhanakan realitas historis dan sosial. Artikel ini merupakan tinjauan literatur naratif yang merangkum temuan-temuan kunci tentang (1) asal-usul dan ciri konseptual Wahhabiyah, (2) relasinya dengan negara Saudi dan dinamika global, (3) hubungan antara Wahhabiyah/Salafisme dan kekerasan politik, serta (4) bagaimana media membingkai label "Wahhabi" sebagai kategori identitas yang sering bersifat stigmatif. Sintesis literatur menunjukkan bahwa Wahhabiyah sebagai tradisi reformis berjejaring dengan institusi negara Saudi dan beririsan—tetapi tidak identik—dengan spektrum Salafisme global (quietist, politik, jihadis). Penyamaan otomatis antara "Wahhabi" dan "teroris" tidak didukung oleh pendekatan akademik yang membedakan konteks, aktor, dan orientasi politik. Artikel ini menutup dengan implikasi praktis bagi literasi media: perlunya definisi operasional, rujukan sumber primer/sekunder yang kredibel, serta kehati-hatian menggunakan label yang berpotensi mengaburkan kompleksitas intra-Muslim.

Kata Kunci : *Wahhabiyah, Salafisme, Framing Media, Arab Saudi, Radikalisme, Labelisasi*

PENDAHULUAN

Istilah *Wahhabiyah* kerap hadir dalam pemberitaan, baik ketika media membahas sejarah Arab Saudi, pembaruan keagamaan, maupun isu konservatisme dan ekstremisme. Namun, penggunaan istilah tersebut di ruang publik sering tidak konsisten: "Wahhabi" dapat muncul sebagai kategori teologis, cap sosial, atau label politik yang dilekatkan pada kelompok tertentu tanpa definisi operasional yang jelas. Ketidakjelasan ini membuat pembaca sulit membedakan antara uraian berbasis kajian ilmiah dan narasi yang dibentuk oleh kepentingan wacana media (Commins, 2006; Haykel, 2009).

Secara historis, Wahhabiyah merujuk pada gerakan reformis yang berakar pada pemikiran Muhammad ibn ʻAbd al-Wahhab pada abad ke-18. Gerakan ini menekankan pemurnian tauhid, kritik terhadap praktik yang dipandang sebagai *bidʻah*, serta ajakan kembali kepada sumber-sumber normatif Islam menurut penafsiran para pendukungnya (Commins, 2006; Delong-Bas, 2004). Dalam kerangka akademik, istilah "Wahhabiyah" karena itu perlu dipahami sebagai fenomena historis yang memiliki konteks sosial, jaringan ulama, dan perkembangan wacana yang tidak selalu seragam dari masa ke masa.

Perkembangan Wahhabiyah juga sulit dilepaskan dari keterkaitannya dengan proyek politik Dinasti Al Saud. Aliansi historis antara otoritas keagamaan dan kekuasaan negara membentuk institusi, kebijakan, serta kanal penyebaran gagasan yang kemudian berpengaruh melampaui batas Saudi Arabia (Al-Rasheed, 2010; Lacroix, 2011). Dalam konteks ini, pemberitaan sering mencampurkan dimensi keagamaan dan geopolitik, sehingga istilah "Wahhabi" dapat bergeser dari kategori deskriptif menjadi perangkat penjelas yang menyederhanakan konflik sosial-politik dan perbedaan intra-Muslim.

Di sisi lain, narasi media tentang radikalisme kerap membangun asosiasi langsung antara Wahhabiyah dan kekerasan politik, seolah-olah keduanya identik. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa label "Wahhabi" dalam polemik publik sering bekerja sebagai generalisasi dan mengabaikan variasi internal, perbedaan konteks lokal, serta spektrum sikap yang tidak tunggal pada aktor-aktor yang dikaitkan dengannya (Haykel, 2009; Lacroix, 2011). Akibatnya, muncul mitos yang bertahan lama misalnya anggapan bahwa semua yang "Wahhabi" pasti ekstrem—padahal realitas sosial-keagamaan lebih kompleks dan berubah seiring dinamika institusi, pendidikan, dan kebijakan.

Artikel tinjauan literatur ini menata ulang pembahasan melalui tiga fokus: **fakta** (sejarah dan konsep dasar), **mitos** (penyederhanaan dan labelisasi di ruang publik), dan **realitas** (variasi kontemporer, relasi negara, serta dinamika global). Rumusan masalahnya ialah: (1) bagaimana literatur akademik mendefinisikan Wahhabiyah dan hubungannya dengan Salafisme, (2) narasi apa yang paling sering memitoskan "Wahhabi" dalam pemberitaan, dan (3) bagaimana penelitian kontemporer menjelaskan relasi antara gerakan reformis ini, institusi negara, dan isu kekerasan politik.

METODE

Artikel ini menggunakan **tinjauan literatur naratif** (*narrative literature review*) untuk memetakan bagaimana istilah *Wahhabiyah* dipahami dalam kajian akademik dan bagaimana label tersebut beredar dalam wacana pemberitaan. Pendekatan naratif dipilih karena tujuan utama tulisan adalah **menyintesis tema, memperjelas istilah, dan membandingkan argumen lintas**

karya, bukan menguji efektivitas intervensi atau menghitung besaran efek seperti pada *systematic review* atau *meta-analysis*.

Pertanyaan panduan dalam penelusuran literatur dirumuskan sebagai berikut: (1) bagaimana literatur menjelaskan asal-usul, doktrin pokok, dan perkembangan historis Wahhabiyah; (2) bagaimana relasi Wahhabiyah dengan institusi negara Saudi dijelaskan dalam penelitian kontemporer; (3) bagaimana literatur membedakan Wahhabiyah dari Salafisme dan varian-variannya; (4) sejauh mana studi akademik mengaitkan Wahhabiyah/Salafisme dengan kekerasan politik; dan (5) bagaimana teori komunikasi menjelaskan proses framing dan labelisasi "Wahhabi" di media (Commins, 2006; Entman, 1993; Haykel, 2009; Wiktorowicz, 2006). Pertanyaan ini berfungsi sebagai batasan agar pembahasan tetap fokus pada relasi "fakta–mitos–realitas" dan menghindari generalisasi yang tidak didukung bukti.

Strategi penelusuran sumber dilakukan dengan mengutamakan publikasi akademik berbahasa Inggris dan Indonesia yang relevan pada bidang studi Islam, sejarah-politik Saudi, gerakan Salafi, serta studi media. Penelusuran dipandu oleh kata kunci seperti "Wahhabism/Wahhabi," "Salafism/Salafi," "Saudi religious establishment," "jihadism," "Islamic reform movement," serta "media framing" dan "labeling," yang kemudian disesuaikan dengan padanan bahasa Indonesia (misalnya "Wahhabiyah," "Salafisme," "framing media," "labelisasi"). Selain itu, digunakan teknik *backward search* (menelusuri daftar pustaka dari karya kunci) untuk menemukan sumber-sumber yang sering dirujuk.

Kriteria inklusi mencakup: (a) buku akademik dari penerbit universitas/ilmiah dan artikel jurnal/chapters yang terindeks atau diterbitkan oleh penerbit bereputasi; (b) karya yang secara eksplisit membahas Wahhabiyah dan/atau Salafisme pada level historis, konseptual, atau sosial-politik; (c) karya yang menawarkan kerangka analitis yang dapat dibandingkan lintas studi (misalnya tipologi Salafi atau analisis institusi).

Kriteria eksklusi mencakup: (a) tulisan opini populer tanpa dukungan rujukan yang memadai; (b) materi propaganda atau polemik yang tidak dapat diverifikasi; dan (c) sumber yang menggunakan istilah "Wahhabi" semata sebagai cercaan tanpa definisi dan tanpa pemaparan konteks. Untuk menjaga **kualitas dan kredibilitas sumber**, artikel ini memprioritaskan karya yang (a) memiliki metodologi jelas, (b) memberikan rujukan ke sumber primer/arsip atau data lapangan, dan/atau (c) diakui luas dalam literatur (misalnya kajian sejarah Saudi, kajian gerakan Salafi, dan kajian jihadisme). Ketika terdapat perbedaan pandangan antarpenulis (misalnya tentang hubungan Wahhabiyah dan jihadisme), perbedaan tersebut **tidak diseragamkan**, melainkan dipetakan sebagai variasi argumentasi yang dipengaruhi fokus studi, lokasi penelitian, dan periode analisis.

Proses ekstraksi dan pengorganisasian data dilakukan dengan mencatat poin-poin inti dari setiap sumber: definisi istilah, konteks historis, aktor dan institusi kunci, klaim utama, bukti yang dipakai, serta batasan yang diakui penulis. Catatan tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam matriks tema untuk menyusun sintesis pada bagian pembahasan, khususnya ke dalam tiga klaster besar: **(1) fakta historis-konseptual**, **(2) mitos/penyederhanaan dalam wacana publik**, dan **(3) realitas kontemporer yang bersifat variatif**.

Teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif-interpretatif, yaitu membandingkan konsep dan temuan antar sumber untuk menemukan pola (misalnya: kesamaan definisi, perbedaan penekanan, dan faktor konteks yang sering diabaikan media). Untuk aspek media, kerangka **framing** digunakan sebagai lensa konseptual, terutama gagasan bahwa media

menyeleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas sehingga memengaruhi cara audiens memahami sebab-akibat dan penilaian moral atas isu (Entman, 1993).

Artikel ini juga menerapkan **batasan istilah operasional** agar konsisten: "Wahhabiyah" dipakai terutama untuk tradisi reformis yang terkait sejarah Ibn ʻAbd al-Wahhab dan institusi keagamaan Saudi; "Salafisme" dipakai sebagai payung gerakan pemurnian yang lebih luas; sementara "radikalisme/ekstremisme" diperlakukan sebagai kategori analitis yang memerlukan indikator perilaku dan posisi politik, bukan sekadar identitas teologis (Haykel, 2009; Wiktorowicz, 2006). Pembatasan ini dimaksudkan untuk mengurangi bias akibat penggunaan label yang terlalu longgar.

Keterbatasan metode ini perlu dicatat. Karena tinjauan bersifat naratif, artikel ini tidak menjamin kelengkapan cakupan sebagaimana *systematic review* dan tidak melakukan penilaian risiko bias secara formal. Selain itu, sebagian literatur mengenai Wahhabiyah/Salafisme bersifat normatif atau dipengaruhi dinamika politik, sehingga pembaca perlu memperhatikan posisi penulis, konteks penerbitan, dan jenis data yang digunakan. Meski demikian, dengan memusatkan sumber pada karya-karya akademik yang mapan dan menggunakan kerangka tema yang transparan, artikel ini diharapkan memberikan sintesis yang cukup kuat untuk membedakan antara klaim yang didukung literatur dan klaim yang bersifat mitologis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Genealogi Historis: Dari Reformasi Keagamaan ke Proyek Sosial-Politik

Literatur sejarah menempatkan Wahhabiyah sebagai gerakan reformis abad ke-18 yang menonjolkan purifikasi tauhid dan kritik terhadap praktik yang dipandang menyimpang. Dalam pembacaan Commins (2006), gerakan ini berkembang melalui jaringan ulama dan aliansi politik yang pada akhirnya membantu membentuk negara Saudi modern. Perspektif ini penting karena menegaskan bahwa Wahhabiyah bukan sekadar "doktrin," melainkan fenomena historis yang bergerak melalui institusi, pendidikan, otoritas keagamaan, dan perubahan sosial.

Keterkaitan dengan Dinasti Al Saud membuat Wahhabiyah sulit dipisahkan dari dinamika negara: legitimasi politik, pengaturan ruang publik, dan otoritas hukum-keagamaan. Al-Rasheed (2010) menunjukkan bagaimana sejarah Saudi memperlihatkan negosiasi berkelanjutan antara otoritas kerajaan dan otoritas ulama, sehingga "Wahhabiyah" juga mengalami adaptasi seiring kebutuhan negara dan tekanan internal maupun eksternal.

2. Terminologi: Wahhabiyah vs. Salafisme dan Masalah Pelabelan

Salah satu sumber kebingungan publik adalah tumpang tindih istilah: "Wahhabiyah," "Salafi," "fundamentalis," "puritan," bahkan "ekstremis." Haykel (2009) menekankan perlunya kehati-hatian: Salafisme merupakan payung yang lebih luas, sedangkan "Wahhabiyah" sering dipakai sebagai istilah historis yang terkait kuat dengan Saudi. Dalam praktik, sebagian kelompok yang disebut "Salafi" tidak selalu mengidentifikasi diri sebagai "Wahhabi," dan sebaliknya label "Wahhabi" sering diberikan oleh pihak luar sebagai istilah polemik.

Dalam kajian gerakan Islam, Wiktorowicz (2006) menawarkan tipologi yang membantu mengurai kekaburan: **Salafi quietist** (berorientasi dakwah dan ketaatan pada otoritas), **Salafi politik** (terlibat dalam aktivisme politik), dan **Salafi jihadis** (membenarkan kekerasan bersenjata). Tipologi ini berguna untuk menolak generalisasi bahwa semua "Salafi/Wahhabi" memiliki orientasi politik yang sama.

3. Wahhabiyah, Institusi Saudi, dan Penyebaran Global

Literatur juga menyoroti peran institusi Saudi—pendidikan, lembaga fatwa, dan pendanaan dakwah—dalam memperluas pengaruh gagasan. Lacroix (2011) memperlihatkan bahwa bahkan di dalam Saudi sendiri terdapat kontestasi dan varian oposisi religius, termasuk "kebangkitan" (ṣaḥwa) yang tidak dapat disederhanakan sebagai kepanjangan tangan negara. Artinya, "Wahhabiyah" di tingkat kontemporer adalah arena tarik-menarik antara institusi resmi, ulama, aktivis, dan perubahan generasi.

Konteks geopolitik (Perang Dingin, konflik regional, dan politik pasca-9/11) ikut membentuk bagaimana Wahhabiyah dibaca di luar Saudi. Karena itu, ketika media mengaitkan Wahhabiyah semata-mata dengan agenda ekspor ideologi, analisis akademik biasanya menambahkan variabel: kepentingan negara, jaringan transnasional, kondisi lokal penerima, dan dinamika organisasi (Al-Rasheed, 2010; Lacroix, 2011).

4. Wahhabiyah dan Kekerasan Politik: Apa yang Didukung Literatur?

Salah satu "simpul mitos" paling kuat ialah penyamaan otomatis Wahhabiyah dengan terorisme. Literatur akademik cenderung lebih berhati-hati: ada hubungan historis dan ideologis tertentu antara sebagian varian Salafisme dan gerakan jihadis, tetapi hubungan itu **tidak linear** dan **tidak tunggal**. Hegghammer (2010) menunjukkan kompleksitas jihadisme di Saudi: terdapat percampuran faktor ideologi, represi negara, perang luar negeri, jaringan veteran, dan momen politik tertentu.

Dengan memakai kerangka tipologi (Wiktorowicz, 2006), klaim media seperti "Wahhabi = radikal" menjadi problematis karena menutup perbedaan orientasi (quietist vs. jihadis) dan meniadakan faktor konteks. Dalam standar akademik, penyematan kategori "ekstremisme" umumnya memerlukan indikator perilaku dan organisasi (misalnya dukungan terhadap kekerasan, target sipil, taktik teror), bukan sekadar afiliasi teologis.

5. "Wahhabi" dalam Berita: Framing, Stigma, dan Politik Makna

Kajian komunikasi memperlihatkan bahwa media tidak hanya "melaporkan" realitas, tetapi juga *membingkai* (frame) isu: memilih aspek tertentu untuk ditonjolkan, memberi penekanan kausal, dan membentuk penilaian moral (Entman, 1993). Dalam konteks "Wahhabiyah," framing sering beroperasi melalui: (a) penyederhanaan istilah, (b) asosiasi berulang dengan kekerasan, dan (c) penghilangan keragaman internal.

Jika label "Wahhabi" digunakan sebagai sinonim "Islam keras," maka ia berfungsi sebagai *shortcut* naratif yang memudahkan cerita tetapi berisiko tinggi menghasilkan misinformasi. Praktik ini juga dapat memperlebar jarak sosial antarkelompok Muslim karena perbedaan intra-agama dibaca sebagai ancaman homogen, bukan sebagai perbedaan penafsiran dan praksis yang beragam.

6. Realitas Lokal: Variasi Penerimaan dan Adaptasi di Luar Saudi (Contoh Indonesia)

Studi tentang Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa gagasan Salafi (yang kadang dilabeli "Wahhabi") berinteraksi dengan tradisi lokal, organisasi, dan dinamika politik domestik. Hasan (2006) mencontohkan bagaimana militansi pasca-Reformasi tidak bisa dijelaskan oleh ideologi impor semata; ia terkait dengan konteks konflik komunal, peluang mobilisasi, dan kontestasi identitas. Van Bruinessen (2013) menekankan bahwa arus konservatisme di Indonesia memiliki banyak sumber dan bentuk; menyempitkannya menjadi "produk Wahhabi" sering tidak memadai untuk menjelaskan variasi aktor dan motivasi.

Temuan-temuan ini memperkuat argumen inti artikel: memahami "Wahhabiyah di balik berita" menuntut pembedaan antara konsep historis, label polemik, dan realitas sosial yang dipengaruhi konteks lokal.

Sintesis: Fakta, Mitos, dan Realitas

Fakta (yang relatif stabil dalam literatur):

1. Wahhabiyah berakar pada gerakan reformis abad ke-18 dan terkait erat dengan sejarah pembentukan negara Saudi (Al-Rasheed, 2010; Commins, 2006).
2. Ada relasi institusional antara otoritas keagamaan dan negara, tetapi hubungan itu berisi negosiasi dan kontestasi (Lacroix, 2011).
3. Salafisme adalah spektrum luas; menyamakan semua varian dengan satu orientasi politik adalah keliru (Haykel, 2009; Wiktorowicz, 2006).

Mitos (yang sering muncul dalam wacana media/populer):

1. "Wahhabi" identik dengan terorisme.
2. Wahhabiyah adalah blok tunggal tanpa variasi internal.
3. Semua konservatisme Muslim dapat dijelaskan dengan satu sumber "Wahhabi."

Realitas (yang menuntut pembacaan kontekstual):

1. Orientasi kelompok yang dilabeli "Wahhabi/Salafi" bervariasi: dakwah, politik, hingga jihadis (Wiktorowicz, 2006).
2. Kekerasan politik muncul dari kombinasi ideologi dan kondisi struktural (konflik, represi, jaringan, kesempatan mobilisasi), bukan dari label teologis semata (Hegghammer, 2010).
3. Di luar Saudi, gagasan beradaptasi dengan konteks lokal dan tidak selalu menghasilkan bentuk yang sama (Hasan, 2006; Van Bruinessen, 2013).

KESIMPULAN

Literatur yang ditinjau menegaskan bahwa *Wahhabiyah* paling tepat dipahami sebagai tradisi reformis historis yang berakar pada pemikiran Muhammad ibn 'Abd al-Wahhab dan kemudian berkelindan dengan pembentukan serta institusionalisasi negara Saudi modern (Al-Rasheed, 2010; Commins, 2006). Dalam kerangka ini, penggunaan "Wahhabi" sebagai label serba guna untuk semua ekspresi konservatisme Islam cenderung tidak presisi dan berpotensi mengaburkan konteks historis, institusional, dan variasi praktik di lapangan. Pembedaan terminologis juga penting: "Wahhabiyah" tidak identik dengan "Salafisme" sebagai kategori yang lebih luas dan beragam orientasi (Haykel, 2009; Wiktorowicz, 2006).

Tinjauan ini juga menunjukkan bahwa penyamaan otomatis antara Wahhabiyah/Salafisme dan kekerasan politik merupakan simplifikasi yang tidak sejalan dengan temuan akademik. Studi tentang jihadisme menekankan bahwa kekerasan bersenjata umumnya muncul dari kombinasi faktor ideologi dan faktor kontekstual—misalnya represi negara, jejaring militan, konflik regional, dan peluang mobilisasi—sehingga analisis yang memadai membutuhkan indikator perilaku dan konteks, bukan sekadar label teologis (Hegghammer, 2010). Selain itu, dinamika internal di Saudi memperlihatkan adanya negosiasi dan perubahan relasi ulama–negara, yang semakin menguatkan bahwa Wahhabiyah tidak dapat diperlakukan sebagai blok tunggal yang statis (Lacroix, 2011).

Pada level wacana publik, teori framing membantu menjelaskan bagaimana media dapat membentuk persepsi melalui seleksi aspek tertentu (definisi masalah, atribusi sebab, dan penilaian moral), termasuk saat istilah "Wahhabi" dipakai sebagai stempel yang

menyederhanakan kompleksitas (Entman, 1993). Karena itu, implikasi utama artikel ini adalah perlunya definisi operasional yang konsisten, pemisahan level analisis (doktrin, institusi, aktor, konteks), serta penggunaan rujukan akademik untuk menguji klaim populer sebelum menyimpulkan hubungan sebab-akibat. Riset lanjutan yang disarankan mencakup analisis isi/framing media yang sistematis dan studi lapangan komparatif untuk memetakan variasi penerimaan serta transformasi gagasan di konteks lokal yang berbeda (Van Bruinessen, 2013; Wiktorowicz, 2006).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Rasheed, M. (2010). *A history of Saudi Arabia* (2nd ed.). Cambridge University Press.

Commins, D. (2006). *The Wahhabi mission and Saudi Arabia*. I.B. Tauris.

Cook, D. (2015). *Understanding jihad* (2nd ed.). University of California Press.

Delong-Bas, N. J. (2004). *Wahhabi Islam: From revival and reform to global jihad*. Oxford University Press.

Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication, 43*(4), 51–58.

Hasan, N. (2006). *Laskar Jihad: Islam, militancy, and the quest for identity in post-New Order Indonesia*. Cornell Southeast Asia Program.

Haykel, B. (2009). On the nature of Salafi thought and action. In R. Meijer (Ed.), *Global Salafism: Islam's new religious movement* (pp. 33–57). Hurst.

Hegghammer, T. (2010). *Jihad in Saudi Arabia: Violence and pan-Islamism since 1979*. Cambridge University Press.

Lacroix, S. (2011). *Awakening Islam: The politics of religious dissent in contemporary Saudi Arabia*. Harvard University Press.

Mandaville, P. (2007). *Global political Islam*. Routledge.

Meijer, R. (Ed.). (2009). *Global Salafism: Islam's new religious movement*. Hurst.

Scheufele, D. A., & Tewksbury, D. (2007). Framing, agenda setting, and priming: The evolution of three media effects models. *Journal of Communication, 57*(1), 9–20. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2007.00326.

Van Bruinessen, M. (2013). *Contemporary developments in Indonesian Islam: Explaining the "conservative turn"*. ISEAS–Yusof Ishak Institute.

Vogel, F. E. (2000). *Islamic law and legal system: Studies of Saudi Arabia*. Brill.

Wiktorowicz, Q. (2006). Anatomy of the Salafi movement. *Studies in Conflict & Terrorism, 29*(3), 207–239. https://doi.org/10.1080/10576100600620031